



Menko Polhukam Lindungi ASN

Wagub: Jangan Takut Kelola Anggaran

PONTIANAK, TRIBUN - Wakil Gubernur Kalbar Christandy Sanjaya meminta jajaran SKPD di Pemprov Kalbar tak takut mengelola anggaran. Pasalnya, Presiden RI Joko Widodo melalui Menko Polhukam Luhut Binsar Pandrajaitan akan melindungi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengelolaan anggaran.

Christandy hadir secara langsung dalam kegiatan di Istana Merdeka RI Jakarta bersama Presiden RI Jokowi, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja lainnya, Selasa (20/10).

"Kegiatan itu membahas masalah penyerapan anggaran, dana desa, Pilkada serentak dan paket kebijakan," ujar Christandy kepada *Tribun*, Jumat (23/10). Wagub mengatakan, ke-

Malah pak menteri berulang menyampaikannya akan melindungi kalian, yang memang menjalankannya dengan sesungguhnya dan baik. Tapi kalau yang melindangkannya.

CHRISTIANDY SANJAYA

Wakil Gubernur Kalbar

giatan itu juga dihadiri Menteri Perencanaan, Menkopolkukam dan gubernur. "Rapat itu berkaitan daya serap empat hal tersebut. Menteri perekonomian menyampaikan situasi ekonomi yang ada, juga mempelajari tentang paket-paket kebijakan baik 1, 2, 3 dan 4," ucapnya.

Terkait masalah daya serap, kata Wagub, juga sudah dijelaskan oleh menteri pe-

rekonominan. Bahkan Menkopolkukam sendiri, memberikan nomor kontak HP-nya kepada peserta. Meminta kepada penerintah daerah, jangan ada ketakutan lagi dengan pelaksanaan hukum, sepanjang negakan hukum, sepanjangan menjalankan sesuai dengan aturan. Sehingga tidak dengan gangguan penyerapan anggaran dan kesejahteraan masyarakat.

"Pak menteri menyampaikannya, kalau proyek sedang berjalan mestinya penegak hukum jangan masuk dulu sebelum BPK dan BPKP memberikan penilaian. Kalau masuk dulu, maka akan mengganggu proses belajarnya proyek. Hal tersebut disampaikan dihadapan Kapolri dan Kejaksaaan Agung," tuturnya.

Menurut Menkopolkukam, lanjut Christandy, kalau BPK sudah melakukan pemeriksaan pastinya pemerintah diberikan waktu sekitar 60 hari untuk mengklarifikasi. Sebelum masa itu, mestinya tidak ada kepolisian ataupun kejaksaan yang datang.

"Sebab akan menyedat proses proyeknya. Kalau sudah diperiksa BPK ada temuan penyimpangan walaupun ditindak secara hukum.

Pak menteri minta semua yang sudah dianggarkan bisa dijalankan dengan baik sesuai aturan. Malah pak menteri berulang menyampaikan bahwa dia akan melindungi kalian, yang memang menjalankan dengan sesungguhnya dan baik. Tapi kalau yang melanggarnya juga akan melindangkannya, ucapnya.

Selain itu, kata Wagub, Presiden Jokowi menyampaikan kondisi perekonomian sekarang ini bukan krisis tapi hanya perlambatan pertumbuhan perekonomian.

"Perekonomian kita masih tumbuh sekitar 4 persen lebih sampai hari ini. Diprediksi sampai akhir tahun sekitar 4,5 persen sampai 5 persen pertumbuhan perekonomian," ungkapnya. (ruil)